



1.320 Randis Tak Punya BPKB

1.320 Randis Tak Punya BPKB

Pengelolaan Aset Pemkab Bone Amburadul

REPORTER **ASHARI PRAWIRA NEGARA**
EDITOR **NURLINA ARSYAD**

BONE, FAJAR — Pengelolaan aset bergerak milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone amburadul. Bayangkan saja, ada 1.320 unit kendaraan dinas (randis) yang beroperasi tanpa mengantongi Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).

BERDASARKAN informasi yang dihimpun, total nilai aset dari 1.320 unit kendaraan itu mencapai Rp37,3 mili-

ar. Ironisnya, kendaraan tanpa BPKB rawan disalahgunakan, kendaraan juga berpotensi hilang atau dibawa lari oknum tak bertanggung jawab.

Tak hanya itu, ada 83 randis yang tidak diketahui keberadaan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)-nya sebagai legalitas operasional di jalan. Kemudian, ada 88 unit roda dua dan 18 roda empat pada 27 SKPD dan 8 BLUD yang belum dicatatkan pada KIBB, sehingga belum disajikan pada neraca aset Laporan Keuangan Pemkab Bone.

Kendaraan ini bisa ditemu-

kan di lapangan dengan pelat merah yang menandakan milik Pemkab Bone. Amburadulnya pengelolaan aset tersebut disoroti Anggota DPRD Bone Andi Idris Alang. Ia menilai kondisi tersebut cukup fatal.

Apalagi, kata dia, banyaknya aset-aset yang tidak punya legalitas tersebut rawan dibawa dan dikuasai oleh para eks pejabat dan tak kunjung dikembalikan.

"Ini kan banyak aset bergerak yang dikuasai oleh mantan pejabat. Itu rawan, dan mesti ditarik semua, tidak ada alasannya lagi," tegas Ketua Fraksi

Partai Golkar ini.

Selain itu, lanjutnya, tanpa dilengkapi dengan legalitas kepemilikan yang sah, kendaraan ini tentunya akan mengalami kendala saat tiba waktunya akan dilelang ke masyarakat. Menurut Idris, beberapa aset randis milik Pemkab ini sudah ada yang mesti dilelang, sehingga masalah ini harus segera diselesaikan.

"Seperti kendaraan yang lebih banyak biaya maintainancenya, lebih baik dilelang secepatnya," tambahnya.

Kepala Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Da-

erah (BKAD) Bone, A Duhriati mengatakan, masalah aset bergerak di Pemkab Bone ini, terjadi akibat OPD yang tidak update terkait perubahan pelat kendaraannya.

"Pada saat cek fisik, ternyata kendaraan itu tidak sama di data. Jadi seharusnya setiap lima tahun, harus ada penggantian pelat. Nah itu yang tidak dilakukan oleh teman-teman," jelasnya saat ditemui di ruangannya.

Meski demikian, ia mengaku saat ini pihaknya tengah melakukan perbaikan terkait persoalan ini. (*)